

ABSTRAK

Notaris adalah sebagai pejabat umum yang menjalankan profesinya dalam memberikan jasa hukum wajib tunduk terhadap tugas, wewenang dan larangan jabatannya. Kode etik bertujuan memastikan bahwa notaris menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. 70 Notaris dalam praktiknya di Kabupaten Pati, 5 melakukan berbagai pelanggaran kode etik. Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) berfungsi sebagai pengawas yang bertugas menegakkan kode etik tersebut.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Tugas Pengawasan Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah di Kabupaten Pati dan peran Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati.

Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah non doktrinal (*yuridis empiris*). Sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *evaluatif*. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan data primer yang mencakup studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yaitu observasi dan wawancara, studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan dokumen untuk mendalami pandangan ahli dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan *analisis kualitatif* sebagai metode dalam analisis data.

Pelaksanaan tugas pengawasan kode etik notaris oleh Majelis Pengawas Notaris di Kabupaten Pati secara normatif telah mengacu pada ketentuan UUNJ dan Permenkumham. Praktik yang terjadi di Kabupaten Pati, tugas pengawasan belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh faktor kultur. Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam penegakan kode etik notaris di Kabupaten Pati yaitu sebagai pengawas dan pembina, guna mencegah terjadinya pelanggaran. MPD juga melakukan pengawasan secara berkala terhadap protokol notaris dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik maupun jabatan notaris.

Pemerintah perlu mendukung peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) melalui regulasi, sarana, dan anggaran yang memadai serta koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Ikatan Notaris Indonesia agar pengawasan notaris lebih efektif. MPD juga harus meningkatkan pembinaan, mempercepat penanganan laporan, dan menjaga transparansi, sementara masyarakat perlu memahami hak dan kewajibannya, berpartisipasi dalam pengawasan, serta selektif memilih notaris profesional.

Kata Kunci : MPD; Penegakan Kode Etik; Notaris.

ABSTRACT

Notaries are public officials who carry out their profession in providing legal services and are subject to the duties, authorities, and restrictions of their position. The code of ethics aims to ensure that notaries carry out their duties and authorities in accordance with the Notary Position Law. Of the 70 notaries practicing in Pati Regency, 5 committed various violations of the code of ethics. The Regional Notary Supervisory Council (MPD) functions as a supervisory body tasked with enforcing the code of ethics.

The purpose of this study is to analyze the implementation of notary code of ethics supervision by the Regional Notary Supervisory Council in Pati Regency and the role of the Regional Notary Supervisory Council in enforcing the notary code of ethics in Pati Regency.

This type of research falls under the scope of empirical research. The approach used in this research is non-doctrinal (juridical empirical). The sources and types of data used are primary and secondary data. The research specification used is evaluative. The data collection method uses primary data, which includes field studies and literature studies. Field studies include observation and interviews, while literature studies include books, journals, and documents to explore expert views and information related to the issue. This study uses qualitative analysis as a method of data analysis.

The implementation of notary code of ethics supervision by the Notary Supervisory Council in Pati Regency has normatively referred to the provisions of the UUJN and Permenkumham. In practice, supervision in Pati Regency has not been optimal due to cultural factors. The role of the Regional Notary Supervisory Council in enforcing the notary code of ethics in Pati Regency is to supervise and provide guidance in order to prevent violations. The MPD also conducts regular supervision of notary protocols and follows up on public complaints regarding alleged violations of the code of ethics or notary positions.

The government needs to support the role of the Regional Supervisory Council (MPD) through adequate regulations, facilities, and budgets, as well as coordination with the Ministry of Law and Human Rights and the Indonesian Notary Association so that notary supervision is more effective. The MPD must also improve guidance, speed up the handling of reports, and maintain transparency, while the public needs to understand their rights and obligations, participate in supervision, and be selective in choosing professional notaries.

Keywords: MPD; Code of Ethics Enforcement; Notaries.